

Relasi Kuasa Michel Foucault dalam Kanonisasi Ibnu Mujahid

Saifiddaulah Shofiyullah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: saifi.daulah2000@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03-01-2026

Revised: 20-01-2026

Accepted : 30-01-2026

Kata Kunci

Kanonisasi
Qira'at Sab'ah
Relasi Kuasa Michel Foucault

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ilmu *Qira'at*, variasi dalam bacaan al-Qur'an. Penulis tertarik untuk melihat kembali terhadap otentisitas *qira'at*. Ketidakpastian dan kontroversi seputar otentisitas *qira'at*, baik yang disampaikan oleh sarjana Barat maupun Muslim, menjadikan topik ini semakin menarik untuk kaji lebih dalam dengan menggunakan kerangka berpikir dari teori relasi kuasa Michel Foucault yang berasal dari Barat sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menggali sejarah penyeragaman dan kanonisasi *qira'at* yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid dalam menetapkan tujuh imam sebagai otoritas dalam kanonisasi *qira'at* sab'ah. Sehingga merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu mengapa Ibnu Mujahid melakukan standarisasi *Qira'at* dalam kitabnya as-Sab'ah; apa indikator Ibnu Mujahid dalam menilai *qira'at*; serta apa konteks politik yang melatarbelakangi kanonisasi *qira'at* oleh Ibnu Mujahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kodifikasi dan kanonisasi *qira'at* oleh Ibnu Mujahid tidak hanya karena faktor tentang penyatuan pandangan umat Islam terhadap perbedaan varian bacaan al-Qur'an, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik yang melatarbelakangi proses tersebut. Temuan ini memberikan wawasan baru dalam pemahaman tentang dinamika sejarah *qira'at* al-Qur'an serta pentingnya mempertimbangkan konteks politik dalam pemahaman tradisi keagamaan.

ABSTRACT

Keywords

Canonization
Qira'at Sab'ah
Michel Foucault's Power Relations

This study examines the science of *Qira'at*, the variations in Qur'anic recitation. The author is interested in revisiting the authenticity of *qira'at*. The uncertainty and controversy surrounding the authenticity of *qira'at*, whether presented by Western or Muslim scholars, make this topic even more compelling to study in depth using the framework of Michel Foucault's theory of power relations, which itself originates from the West. This study aims to fill the knowledge gap by exploring the history of standardization and canonization of *qira'at* carried out by Ibn Mujahid in establishing seven imams as authorities in the canonization of the seven canonical *qira'at*. Consequently, it formulates several questions, namely why Ibn Mujahid standardized *Qira'at* in his book *As-Sab'ah*; what indicators Ibn Mujahid used to evaluate *qira'at*; and what political context underlies the canonization of *qira'at* by Ibn Mujahid. The results of this study indicate that the success of the codification and canonization of *qira'at* by Ibn Mujahid was not only due to the factor of unifying the views of Muslims regarding the different variants of Qur'anic readings, but was also influenced by the political factors underlying the process. These findings provide new insights into understanding the dynamics of the history of Qur'anic *qira'at* and the importance of considering the political context in understanding religious traditions.



1. PENDAHULUAN

Konsep relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault merupakan salah satu kontribusi penting dalam ranah pemikiran post-strukturalis dan teori kritis modern (Khozin Afandi, 2015). Foucault menolak pemahaman tradisional tentang kekuasaan yang cenderung dipandang sebagai sesuatu yang bersifat represif dan dimiliki secara terpusat oleh negara, institusi, atau individu tertentu (Gheaus, 2012). Sebaliknya, Foucault menekankan bahwa kekuasaan bersifat difus, produktif, dan melekat dalam setiap relasi sosial. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga membentuk pengetahuan, identitas, dan subjektivitas manusia.

Relasi kuasa menurut Foucault tersebar melalui praktik-praktik diskursif dan institusional, serta beroperasi melalui mekanisme pengawasan, norma, dan disiplin yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini terutama dikembangkan dalam karya-karyanya seperti *Discipline and Punish* (1975) dan *The History of Sexuality* (1976), di mana Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya dalam bentuk dominasi fisik, tetapi juga melalui pengaturan tubuh dan pikiran melalui institusi seperti sekolah, rumah sakit, penjara, dan keluarga. Dalam konteks ini, kekuasaan bekerja melalui apa yang ia sebut sebagai *biopower* dan *governmentality*, yaitu cara-cara pengaturan populasi dan pengendalian perilaku individu melalui norma-norma sosial dan pengetahuan ilmiah (Syafiuddin, 2018).

Konsep kanonisasi qirā'āt al-Qur'ān yang dilakukan oleh Abū Bakr Aḥmad ibn Mūjahid (w. 324 H/936 M) menandai tonggak penting dalam sejarah kodifikasi bacaan al-Qur'an. Dalam karyanya yang monumental, *Kitāb al-Sab'ah fī al-Qirā'āt*, Ibnu Mujāhid mengkonstruksi suatu standar normatif terhadap varian bacaan al-Qur'an dengan menetapkan tujuh qirā'āt yang ia anggap sah dan mutawātir. Penetapan ini bukan semata hasil seleksi arbitrer, melainkan merupakan sintesis atas kompleksitas transmisi oral, validitas sanad, serta otoritas qurrā' (para ahli qirā'āt) yang berkembang di berbagai wilayah Islam. Ibnu Mujāhid menegaskan bahwa qirā'āt yang dapat diterima harus memenuhi tiga kriteria utama: (1) memiliki sanad yang sah (صحة السند), (2) sesuai dengan rasm (tulisan) mushaf 'Utmānī, dan (3) sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab (*muwāfaqah li al-lughah*) (Istajib, Nurhaidah, Haris Hakam, & Mujiadi, 2024).

Ilmu *Qira'at* merupakan warisan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam yang telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Wacana tentang *Qira'at* dalam penjelasan Al-Zarqani (w.948 H) memiliki penekanan yang berpusat pada perbedaan dalam pengucapan di antara para imam qurra' mengenai ayat-ayat dari berbagai pembacaan al-Qur'an.

Ilmu *Qira'at* ini menjadi salah satu disiplin kunci dalam tradisi keilmuan Islam, yang berperan penting dalam menjaga otentisitas transmisi bacaan al-Qur'an dari generasi ke generasi. Sejak awal sejarah Islam, umat Muslim telah berupaya memastikan bahwa bacaan al-Qur'an yang beredar di masyarakat tetap sesuai



dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sehingga kajian *qira'at* menjadi benteng utama dalam mencegah distorsi dan perubahan makna teks suci (Muna & Ikhwan, 2023).

Munculnya perbedaan bacaan al-Qur'an bermula dari pengajaran Nabi Muhammad SAW sendiri kepada para sahabatnya yang memiliki dialek yang berbeda-beda. Berangkat dari fenomena tersebut, kemudian Nabi meminta kepada Allah agar tidak menurunkan al-Qur'an hanya dengan satu huruf saja agar bisa mengakomodir berbagai dialek bahasa Arab yang beragam. Ini menjadi salah satu di antara keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada umat Nabi Muhammad Saw. yakni terkait varian bacaan al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan *qira'at* (Djunaedi, 2008, p. hlm.68).

Namun, sejarah perkembangan *qira'at* diwarnai oleh dinamika yang cukup kompleks, khususnya terkait proses pembakuan atau kanonisasi bacaan yang dianggap sah yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid (w. 936 M) sehingga terkonsep tujuh bacaan yang terpilih atau dikenal dengan konsep *Qira'at Sab'ah*. Setelah munculnya konsep itu disusul dengan menguatnya pertanyaan kritis mengenai mengapa hanya tujuh varian *qira'at* yang diakui sebagai bacaan resmi, sementara banyak varian lain yang juga boleh jadi memenuhi kriteria sanad dan kesesuaian dengan rasm Utsmani. Hal ini memunculkan semacam kejanggalan dalam tradisi keilmuan Islam, karena terkadang keputusan yang diakui secara otoritatif tidak selalu sejalan dengan standar keilmuan yang ada. Untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, artikel ini menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault (w. 1984), seorang filsuf kontemporer yang menekankan bahwa kebenaran tidak pernah lahir secara netral, melainkan merupakan hasil dari relasi antara kekuasaan dan pengetahuan (Khozin Afandi, 2015). Dalam konteks *qira'at*, pendekatan Foucault memungkinkan analisis terhadap bagaimana hubungan politik kekuasaan dengan otoritas keagamaan dalam menentukan bacaan mana yang dianggap sah atau tidak, melalui proses memilih dan menyingkirkan berbagai varian bacaan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis konten yaitu menganalisa isi dari teks untuk memperoleh data-data yang diperlukan (Moleong, 2011, p. hlm.3). Adapun jenis penelitiannya adalah kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan merumuskan data yang bersumber dari literatur atau perpustakaan baik berupa buku, jurnal atau penelitian lainnya yang mendukung untuk memperoleh pemahaman secara luas mengenai proses kanonisasi *Qira'at Sab'ah* yang dilakukan Ibnu Mujahid untuk mencari otoritas Ibnu Mujahid mengenai konsep *Qira'at* yang kanonik. Sumber data yang dipakai berupa

bahan data primer maupun sekunder akan diteliti menggunakan sistem analisis isi agar kemudian mendapatkan hasil yang tepat dan dapat ditelaah keabsahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Mujahid dan Konteks Sosio-Politik Dinasti Abasiyyah

Ibnu Mujahid memiliki nama Ahmad bin Musa bin al-Abbas bin Mujahid al-Baghdadi. Lahir pada tahun 245 H di Suq al-Athas, Baghdad (Al-Dzahabi, 1997, p. hlm.533), dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan agama. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap al-Qur'an dan ilmu *qira'at*. Kedalaman dan keluasan ilmunya tidak lepas dari bimbingan para guru yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu al-Qur'an di Kufah. Hal ini yang kemudian mendorongnya untuk melakukan perjalanan intelektual keluar dari kota kelahirannya ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Hijaz, Bashrah dan Syam. Perjalanan ini membekalinya dengan pengalaman dan jaringan yang luas di kalangan ulama dan qari' pada masanya (Muhammad, 2006).

Pada tahun 286 H, Ibnu Mujahid diangkat sebagai imam *qira'at* di Baghdad, sebuah posisi yang sangat berpengaruh dalam struktur keagamaan dan politik. Posisi ini tidak hanya menandai pengakuan atas keilmuan dan integritasnya, tetapi juga membuka peluang baginya untuk berinteraksi langsung dengan otoritas negara dan para pemangku kepentingan pemerintahan pada masa itu (Jannah, 2019).

Menarik untuk dicermati bahwa pengangkatan tersebut berlangsung pada masa awal kemunduran Dinasti Abbasiyah, khususnya pada era pemerintahan Khalifah al-Radhi Billah. Pada periode ini, kekuasaan khalifah mulai mengalami delegitimasi, ditandai dengan munculnya posisi *amir al-umara'* yang secara *de facto* mengendalikan urusan pemerintahan. Sejak saat itu, kekuasaan khalifah hanya bersifat simbolik, bahkan bergantung secara finansial pada para amir tersebut. Di tengah kondisi politik yang semakin terfragmentasi ini, muncul pula ketegangan sosial keagamaan, khususnya pertentangan antar mazhab, seperti antara mazhab Syafi'i dan Hambali (Hamka, 2016, p. hlm.217).

Di sisi lain Al-Radhi juga berupaya menjaga stabilitas politik dan keagamaan di tengah keragaman interpretasi dan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. tercatat perkembangan ilmu *qira'at* mengalami kemajuan pesat, namun sekaligus dihadapkan pada tantangan keragaman bacaan yang berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang luas. Sehingga membingungkan para muslimin, khususnya orang awam. Untuk itu harus ada seleksi ketat dalam menentukan bahwa mana qiraat yang benar-benar sesuai dengan kaidah(Hamka, 2016).

Dalam konteks ini, peran tokoh keagamaan seperti Ibnu Mujahid menjadi strategis, tidak hanya dalam aspek keilmuan, tetapi juga dalam menjaga otoritas dan stabilitas ajaran agama di tengah gejolak politik dan sosial yang melanda. Kebutuhan akan standarisasi bacaan al-Qur'an semakin mendesak, terutama untuk



mencegah munculnya bacaan-bacaan yang dianggap menyimpang atau tidak memiliki sanad yang jelas. Ibnu Mujahid muncul sebagai sosok yang diandalkan oleh otoritas politik untuk melakukan kodifikasi dan standarisasi *qira'at* (Thobroni, 2017). Keterlibatannya dalam proses ini tidak hanya didasarkan pada keilmuan, tetapi juga pada kepercayaan pemerintah terhadap kemampuannya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan umat melalui pengaturan bacaan al-Qur'an.

Penetapan Qira'ah Sab'ah dan Kontroversinya

Pada dasarnya, Ibnu Mujahid bukanlah orang yang pertama kali mengumpulkan sejumlah *qira'at* dalam satu buku. Sebelumnya ulama lain telah melakukan upaya tersebut, diantara ulama yang telah melakukan kerja-kerja pengumpulan *qira'at* yaitu: *Pertama*, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam (w. 224 H). Dia telah mengumpulkan 25 lima jenis bacaan Imam *qira'at* dalam kitab karangannya yang berjudul *Qararat*. *Kedua*, Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Abu Ishaq Al Azadi Al Baghdadi (w. 282 H), beliau juga guru Ibnu Mujahid. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang di dalamnya mencantumkan 20 bacaan Imam *qira'at*. *Ketiga*, Abu Hatim Sahal bin Muhammad al-Sijistani (w. 255 H), beliau banyak menulis karya termasuk dalam bidang *qira'at*. Kemudian hal yang mendorong Ibnu Mujahid menulis sebuah buku tentang *qira'at* adalah keinginannya yang besar untuk menjaga bacaan-bacaan tersebut dan mempermudah untuk mendapatkannya dan mempelajarinya (Roziqin, 2023).

Ibn Mujahid memperkenalkan tujuh variasi pembacaan Al-Qur'an, yang kemudian diakui sebagai kanonik dan dikaitkan dengan tujuh Imam tertentu. Kumpulan pembacaan ini kemudian dikenal sebagai *Qira'at Sab'ah*. Tujuh imam *qurra* yang terhormat adalah Nafi' al-Madani (w. 169 H/786 M), Ibn Kasir al-Makki (w. 120 H/738 M), Abu 'Amr al-Basri (w. 154 H/770 M), Ibn 'Amir al-Syami (w. 118 H/736 M), 'Aşim al-Kufi (w. 127 H/745 M), Ḥamzah al-Kufi (w. 156 H/772 H), Al-Kisai Al-Kufi (w. 189 H/805 M) (Jazārī, 2006, p. hlm.128).

Ibnu Mujahid melakukan penelitian ketat dan mendalam tentang *qira'at* al-Qur'an yang mutawatir dan bersambung kepada Rasulullah Saw. Dalam penelitian tersebut, Ibnu Mujahid memetakan menjadi bacaan yang benar dan salah. Dalam penyeleksiannya pada bacaan yang mutawatir, Ibnu Mujahid menentukan kriteria khusus, yaitu: *Pertama*, periwayatan yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, sesuai dengan mushaf Ustmani yang dikirim ke berbagai negara. *Ketiga*, sesuai dengan kaidah Bahasa Arab.¹ Dalam hal ini Al-Jazari mengafirmasi fondasi yang telah ditetapkan Ibnu Mujahid dalam bentuk syair di kitabnya *Tayyibat al-Nashr* (Mujahid, n.d., p. hlm.18).

فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يجوي

¹ Ibnu Mujahid, *Kitab Al-Sab'ah fi al-Qira'at* (Mesir: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 18.



وصح إسناده هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان

Tidak sampai disitu, Ibnu mujahid juga melihat pada pribadi Imam yang meriwayatkan *qira'at* tersebut. Kriteria perawi yang dipilih adalah *tsiqah*, *dhabit*, amanah, agamis dan lama berkecimpung dalam mengajar al-Qur'an, ketokohan Masyhur dan ulama lain menerima bacaan *qira'atnya* (Muna, 2021, p. hlm.85). Hasil penelitian Ibnu Mujahid ini kemudian dituangkan dalam karya monumental, yaitu *Kitab al-Sab'ah fi al-Qira'at*. Karya ini menjadi rujukan utama bagi para penggiat *qira'at* dan menjadi dasar bagi standarisasi bacaan al-Qur'an di kalangan umat Islam (Mujahid, n.d.).

Kendati Ibnu Mujahid telah memaksimalkan jerih payahnya dalam penetapan ini, persoalan pro dan kontra tidak dapat dihindari. Ketidaksetujuan ulama lain terkait penetapan imam ketujuh sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Makki bin Abi Thalib dinilai kurang adil dalam menetapkan imam al-Kisa'i daripada Imam Ya'qub al-Hadrami (w.250) seakan-akan Ibnu Mujahid mengedepankan al-Kisai karena bermukim di tempat yang sama, yaitu Bagdad. Sedangkan Imam Ya'qub berada di Bashrah.

Proses penetapan tujuh *qira'at* ini tidak lepas dari dukungan otoritas politik Abbasiyah. Ibnu Mujahid, sebagai qari' dan qadi yang dekat dengan kekuasaan, memiliki otoritas dan kredibilitas yang diakui untuk melakukan standarisasi. Dukungan pemerintah ini menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi kanonisasi *qira'at sab'ah*.

Ibn Mujahid tampil sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang *qira'at*, dengan otoritas dan prestise yang besar. Ia memiliki hubungan dekat dengan Ibn Muqlah, seorang wazir berpengaruh dalam pemerintahan Khalifah al-Radi yang memperkuat posisi dan pengaruhnya secara signifikan. Kedekatan ini memberikan Ibn Mujahid kapasitas untuk menetapkan tujuh bacaan sebagai *qira'at* yang bersifat kanonik (*qira'at sab'ah*). Penting dicatat bahwa upaya kanonisasi ini memperoleh dukungan resmi dari al-Radi. Meskipun situasi politik pada masa itu penuh ketidakstabilan dan konflik kekuasaan, al-Radi tetap mendukung inisiatif Ibn Mujahid, kemungkinan besar sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara politik dan kepentingan strategis para tokoh berpengaruh memainkan peran penting dalam mengangkat *qira'at sab'ah* ke status kanonik, dengan Ibn Mujahid sebagai arsitek utamanya.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat pada masa itu terbelah dalam dua mazhab utama, yaitu Syafi'i dan Hanbali. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang sudah berlangsung sejak masa Khalifah al-Mutawakkil dan berlanjut hingga era al-Radi. Meskipun konflik ini memiliki asal-usul politik yang berbeda, namun demikian memberikan pengaruh penting pada proses kanonisasi *qira'at* selama era Ibn Mujahid (Pulungan, Irham, &



Grahmayanuri, 2022). Dalam konteks ini, seseorang yang tidak membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar yang ditentukan Ibn Mujahid dapat dikenakan proses hukum, seperti yang dicontohkan oleh kasus Ibnu Syanābuẓ dan Ibn Miqsam, keduanya berasal dari Kelompok Hanbali. Proses hukum ini mengindikasikan bahwa bukan hanya persoalan kesalahan membaca, tetapi juga bagian dari konflik ideologi antara mazhab Hanbali dan Syafi'i. Maka, kanonisasi *qira'at* oleh Ibn Mujahid tidak hanya bertujuan untuk standarisasi bacaan, tetapi juga merupakan kemenangan politik mazhab Syafi'i atas Hanbali pada masa itu.

Ibn Shanabuz seorang murid Imam Qunbul- pernah membacakan *qira'at* 'Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay ibn Ka'ab di Mihrab, ketika Ibn Mujahid mendeteksi bahwa pembacaannya bertentangan dengan Mushaf 'Usmani. Ibn Mujahid segera melaporkan temuannya kepada Khalifah Al-Radi, yang kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Ibn Muqlah, yang menjabat sebagai wazir. Menanggapi laporan ini, Ibn Mujahid diinstruksikan untuk menyiapkan laporan resmi yang menjelaskan pengamatannya tentang Ibn Syanabuz yang membaca Al-Qur'an dengan cara yang tidak konsisten dengan standar yang telah ditetapkan Ibn Mujahid. Akibatnya, Ibn Syanabuz harus menjalani persidangan karena membaca Al-Qur'an dengan cara yang bertentangan dengan standar yang diakui. Gambaran kisah ini termaktub dalam Muqaddimah kitabnya Ibnu Mujahid.

وأهم من ذلك موقفه من ابن شنبوذ المقرئ ببغداد لعصره، وكان يعتمد شواذ القراءات ويقرأ بها، وقرأ بالغرائب في بعض صلواته بحروف مروية عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب تخالف مصحف عثمان بن عفان الذي اجتمعت عليه الأمة، وجادل في ذلك، وحاول أن يجتري بها بعض الناس واشتهر أمره. وحاول ابن مجاهد أن يرده إلى جادة الصواب، ولكنه لم ينتبه، فرفع أمره إلى ابن مقلة الوزير حينئذ، فاستدعاه وأحضر القضاة والفقهاء والقراء وفي مقدمتهم ابن مجاهد، وكان ذلك في سنة ٣٢٣ للهجرة، غير أن ابن شنبوذ اعترف بما عرض إليه وأصر عليه، فأشار جميع من حضروا بعقوبته، فضرب بأسواط وحبس، فاعتدل ترتيله. وعقد لذلك ابن مقلة محضراً أقر فيه أن ابن شنبوذ أنه كان يقرأ حروفاً تخالف ما في مصحف عثمان الجميع عليه، وأنه قد تراجع عن ذلك، وأن مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه، ولا أن يُقرأ بغير ما فيه. وكتب ابن مجاهد بيده على المحضر ذلك. وقد عرف بذلك في حضوره طوعاً.²

Kisah persidangan Ibn Shanabuz sebagaimana termuat dalam *Muqaddimah* karya Ibn Mujahid menggambarkan secara jelas dinamika awal kodifikasi dan standarisasi *qira'at*. Peristiwa tersebut tidak sekadar mencerminkan ketegangan antara tradisi *qira'at* yang bersumber dari sahabat Ibn Mas'ud dan Ubay ibn Ka'ab dengan Mushaf 'Usmani, tetapi juga menunjukkan peran krusial otoritas politik dan keagamaan dalam menetapkan legitimasi bacaan yang dianggap sah dalam masyarakat Muslim (Djunaedi, 2008). Tindakan Ibn Mujahid dalam melaporkan

² Ibnu Mujahid, *Kitab Al-Sab'ah fi al-Qira'at* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 15



penyimpangan bacaan yang dilakukan Ibn Shanabuz kepada Khalifah al-Radi dan Wazir Ibn Muqlah, serta sanksi yang dijatuhkan, merefleksikan semangat normatif yang berkembang dalam rangka menyatukan umat dalam satu bacaan yang otoritatif dan mencegah kekacauan teks. Hal ini dalam kajian lain dimaksudkan bahwa al-Qur'an tidak terlepas dari upaya politik untuk membakukan satu bentuk bacaan sebagai representasi otoritatif wahyu. Dengan kata lain, upaya Ibn Mujahid adalah bagian dari proyek kanonisasi qira'at yang lebih besar demi menjaga stabilitas doktrinal umat Islam M. M. Al-A'zami, "Sejarah Teks Al-Qur'an: Dari Wahyu Sampai Kompilasinya," 2005, hlm.27.

Membaca Kanonisasi sebagai Relasi Kuasa

Dalam teori relasi kuasa Michel Foucault ini, ada dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan, yakni; pendekatan 'genealogi' dan metode 'arkeologi'. Terkait dua istilah ini, Foucault menjelaskan dalam karyanya '*Truth and Power*' bahwa; *pertama*, kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan (Khozin Afandi, 2015). Kedua, 'kebenaran' selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Foucault selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhinya dan disebarluaskannya. Hipotesis pertama merupakan hipotesis ringkas Foucault tentang metode arkeologinya, sedangkan hipotesis kedua mengenai pendekatan genealoginya (Fatlolon, 2024).

Kanonisasi, dalam konteks tradisi keilmuan Islam utamanya *qirā'āt* al-Qur'an, tidak hanya dapat dipahami sebagai proses normatif-teologis untuk menentukan keabsahan bacaan wahyu, melainkan juga sebagai praktik yang sarat dengan dinamika relasi kuasa. Ketika Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk dominasi represif, tetapi juga melalui produksi pengetahuan dan normalisasi diskursus, perspektif ini membuka jalan bagi pembacaan ulang terhadap proses kanonisasi yang dilakukan oleh tokoh seperti Ibn Mujāhid (w. 324 H). Kanonisasi tujuh qirā'āt oleh Ibn Mujāhid, meskipun berbasis pada validitas sanad dan kesesuaian dengan rasm, juga merepresentasikan mekanisme kekuasaan epistemik dalam membatasi pluralitas bacaan yang sebelumnya berkembang luas di berbagai wilayah Islam.

Melalui kerangka relasi kuasa Foucauldian, kanonisasi dapat dipahami sebagai bentuk intervensi diskursif yang menetapkan batas antara yang sah dan yang menyimpang (*orthodoxy vs. heterodoxy*) (Siswadi, 2024, p. hlm.73). Dengan memilih tujuh imam bacaan dan mengabaikan varian lain yang meskipun sah tetapi kurang populer atau tidak tersebar luas, Ibn Mujāhid secara tidak langsung mengkonsolidasikan otoritas keilmuan tertentu dan memarginalkan bacaan yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria dominan. Dalam hal ini, institusi keilmuan, para qurrā' berotoritas, serta kekuatan politik yang melingkupi ruang intelektual Baghdad saat itu berperan penting dalam memperkuat hegemonisasi bacaan yang



terpilih. Kanonisasi tidak netral; ia merupakan hasil dari negosiasi sosial, simbolik, dan bahkan politik yang menstrukturkan apa yang dianggap sebagai “bacaan sah” al-Qur’an.

Lebih jauh, dengan melihat kanonisasi sebagai relasi kuasa, kita dapat memahami bahwa otoritas keagamaan tidak hanya bekerja melalui teks dan dalil, melainkan juga melalui kontrol terhadap transmisi dan institusionalisasi pengetahuan (Istajib et al., 2024). Apa yang dikukuhkan melalui proses kanonisasi akan membentuk horizon tafsir, pengajaran, bahkan keyakinan umat dalam jangka panjang. Maka, membaca kanonisasi dari perspektif ini bukan berarti meragukan otentisitas teks suci, melainkan menyoroti bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses seleksi, legitimasi, dan pelestarian bacaan tertentu. Lebih dari itu, trandarisasi qira’at yang dilakukan Ibnu Mujahid sebagai qari’ dan qadi’ memiliki otoritas dan kredibilitas sendiri untuk melakukan standarisasi qira’at (Syafiuddin, 2018). Selebihnya upaya standarisasi yang dilakukan Ibn Mujahid itu karena terdapat upaya sistematis oleh kekuasaan yang menopang praktik kanonisasi tersebut. Pergulatan politik antar penguasa pada saat itu utamanya pada kelompok Hanabilah dan Syafi’iyah menjadi faktor penting dalam upaya kanonisasi oleh Ibnu Mujahid (Muna, 2021). Hal ini yang menjadi pokok persoalan relasi kuasa bagi Foucault bahwa pada konteks terkanonisasinya qira’at menjadi sebuah momentum kemenangan kelompok syafi’iyah atas Hanabilah.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kanonisasi qira’at oleh Ibn Mujahid tidak terlepas dari relasi kuasa yang sarat nuansa politik kepentingan antara kedua kelompok besar masa itu yakni Syafi’iyah dan Hanabilah. Selain itu, kanonisasi qira’at sha’bah Ibn Mujahid dilakukan karena latar belakangnya sebagai qari’ dan qadi’ yang memungkinkan ia memiliki otoritas dan kredibilitas untuk melakukan standarisasi qira’at. Sebab, parameter yang dijadikan pijakan dalam proses kanonisasi Ibn Mujahid dianggap sesuai dengan kaidah bahasa arab, sesuai pula dengan mushaf ‘Usmani dan sanadnya yang langsung tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, artikel ini berhasil mengungkap adanya relasi kuasa sebagaimana konsep Michel Foucault dalam proses kanonisasi qira’at oleh Ibn Mujahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A’zami, M. M. (2005). *Sejarah Teks Al-Qur’an: Dari Wahyu Sampai Kompilasinya* (p. 173). p. 173.
- Al-Dzahabi. (1997). *Ma’rifat al-Qurra al-Kibar ala al-Thabaqat wa al-Ashar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Djunaedi, W. (2008). *Sejarah Qirā’āt Al-Qur’an di Nusantara*. Jakarta: Pustaka STAINU.



- Fatlolon, C. (2024). Kekuasaan Sebagai Kekuatan “Omnipresent” Penyelidikan Filosofis tentang Konsep Kekuasaan Menurut Michel Foucault. *Logos*, 3(1), 16–32.
- Gheaus, A. (2012). Gender Justice. *Journal of Ethics & Social Philosophy*, 6(1), 1–24. https://doi.org/10.1057/9781137321626_4
- Hamka. (2016). *Sejarah Umat Islam: Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Istajib, I., Nurhaidah, S. N., Haris Hakam, M., & Mujiadi, M. (2024). KONTRIBUSI STUDI ISLAM DALAM KAJIAN AL-QUR’AN DAN KANONISASINYA: Pendekatan Interdisipliner Untuk Memperluas Cakrawala Keilmuan. *Moderation / Journal of Islamic Studies Review*, 4(2), 17–36. <https://doi.org/10.63195/moderation.v4i2.112>
- Jannah, Z. (2019). Peranan Ibnu Mujahid dalam Terbentuknya Qiraat Sab’ah (Kajian Kitab al-Sab’ah fi al-Qira’ah). *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram*, 203–215.
- Jazāri, I. (2006). *Ghāyat al-Nihāyah fī Ṭabaqāt al-Qurrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Khozin Afandi, A. (2015). Konsep Kekuasaan Michel Faucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>
- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. S. (2006). Peranan Ibnu Mujāhid dalam Ilmu Qira’at. *Refleksi*, 8(2), 119–142. <https://doi.org/10.15408/ref.v8i2.37676>
- Mujahid, I. (n.d.). *Kitab Al-Sab’ah fi al-Qira’at*. Mesir: Dār al-Ma’rifah.
- Muna, A. A. (2021). *Politik Kuasa Kanonisasi Qira’at Sab’ah Ibnu Mujahid dalam Kitab Al-Sab’ah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muna, A. A., & Ikhwan, M. (2023). Ibn Mujahid’s Canonical Legacy: Examining Sanad Authentication and Political Factors in the Standardization of Qirā’āt sab’ah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 24(2), 359–382. <https://doi.org/10.14421/qh.v24i2.4567>
- Pulungan, N. A., Irham, M. I., & Grahmayanuri, N. (2022). Implementasi Motode Qira’at Sab’ah dalam Al-Quran Surat Al-An’am Ayat 101-108. *Edudeena : Journal of Islamic Religious Education*, 6(2), 87–101. <https://doi.org/10.30762/ed.v6i2.428>
- Roziqin, A. K. (2023). Sejarah dan Proses Kodifikasi Qiraat Sab’ah: Melacak Warisan Penting Dalam Tradisi Membaca al-Qur’an. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 6(2), 210–225.
- Siswadi, G. A. (2024). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Sebagai Homo Complexus*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>
- Thobroni, A. Y. (2017). Ibn Mujāhid Dan Kontribusinya Dalam Qirā’at Al-Qur’Ān. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 63. <https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3783>

